

**BAB III**  
**KONDISI PEREMPUAN PADA MASA AKHIR ORDE BARU**  
**MENUJU REFORMASI TAHUN 1998**

**A. Situasi dan Kondisi Perempuan Sebelum Reformasi**

Orde Baru merupakan masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung antara tahun 1966-1998, yang mengembangkan gaya pemerintahan yang militeristik, paternalistik, tetapi juga menindas. Orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, namun melalui cara-cara yang dikendalikan dengan cermat. Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan taraf pendidikan warganya. Stabilitas politik juga sangat diperhatikan oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga pemerintah berkeberatan jika rakyat berbicara soal isu-isu politik.<sup>1</sup> Antikomunis pemerintahan Orde Baru membuat pemerintahan dekat dengan pihak Amerika Serikat dan mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari negara Amerika Serikat.

Awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke masa Orde Baru ditandai dengan peristiwa tahun 1965, ketika orang yang dicurigai sebagai bagian dari anggota atau simpatisan PKI menjadi sasaran ‘penghapusan’ oleh negara. Mereka yang menjadi tahanan politik akibat dicurigai sebagai komunis mengalami ketidakadilan dalam proses penahanannya. Banyak yang dieksekusi tanpa diadili terlebih dahulu, dan

---

<sup>1</sup> Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern (1200-2004)*. Penerjemah: Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 559.

bagi para perempuan banyak pula yang mengalami kekerasan seksual baik selama menjadi tahanan maupun sesudah bebas dari tahanan.

Kasus-kasus kekerasan seksual juga terjadi pada tahun 1983 ketika aneksasi Timor Timur, yang baru terungkap pada tahun 1987. Perbudakan seksual di Papua, kekerasan pada perempuan Aceh ketika wilayah itu menjadi Daerah Operasi Militer (DOM), serta diskriminasi terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998.<sup>2</sup> Perempuan tidak mampu untuk melawan karena teror yang diciptakan begitu masif disertai tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus tersebut baru terungkap ketika aktivis-aktivis HAM berusaha membongkar kekerasan terhadap perempuan.

Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru sulit ditelusuri karena tidak pernah diberitakan secara resmi baik melalui media massa atau media elektronik. Pelaku-pelaku kekerasan pada perempuan mendapatkan perlindungan dari pihak penguasa sehingga sulit diusut tuntas. Selain itu, aturan hukum yang berlaku juga tidak secara tegas dan berat memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, sedangkan perempuan yang melapor seringkali mendapatkan respon negatif, padahal dampak psikologis dan sosial yang dialami korban jauh lebih berat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mariana. *Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> Sihite. "Kekerasan Negara Terhadap Perempuan", *Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2003, hlm. 37.

Selain kekerasan negara pada perempuan di sektor publik, perempuan juga mengalami kekerasan di sektor privat (*domestic violence*) yang tidak terjangkau oleh hukum. Penyebabnya adalah penegak hukum masih bekerja setengah hati dengan alasan kasus tersebut bersifat sangat pribadi.<sup>4</sup> Maraknya eksploitasi terhadap tubuh perempuan terjadi mulai dari penampilan perempuan dalam iklan televisi atau media cetak, hingga perdagangan manusia.

Atas rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB, Indonesia perlu membentuk Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) bertujuan untuk mendorong gerakan perempuan dengan cara mengumpulkan data dan menyelenggarakan penelitian tentang situasi dan kedudukan perempuan serta memberi rekomendasi atas dasar penelitian tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia juga menjadi bagian dari Tahun Wanita Internasional pada 1975 di New York, dengan tema persamaan (*equality*), pembangunan (*development*), dan perdamaian (*peace*). Pemerintah mendorong masyarakat terutama perempuan bahwa mereka merupakan potensi pembangunan. Untuk menyukseskan program tersebut Soeharto menyampaikan pidatonya pada Kongres Wanita Indonesia, bahwa perempuan memiliki tiga tugas utama sebagai revolusioner. *Pertama*, pengabdian sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai ibu bangsa. *Kedua*, perjuangan pelaksanaan persamaan hak perempuan dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Affiah, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 13.

laki-laki. *Ketiga*, perjuangan membentuk masyarakat sosialis yang adil dan makmu berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup>

Mulai tahun 1975 program tersebut dilibatkan pada organisasi-organisasi perempuan yang secara garis besar dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) para istri pegawai negeri sipil dikelompokkan dalam *Dharma Wanita*; 2) para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam *Dharma Pertiwi*; 3) para wanita di pedesaan yang tidak masuk pada kelompok pertama dan kedua, dibentuk *Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*.<sup>7</sup>

Termasuk kurang lebih 55 organisasi yang tergabung dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia) yang semula merupakan organisasi yang independen dengan pandangan progresif, pada masa Orde Baru menjadi organisasi korporasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan program-program dari pemerintah.<sup>8</sup> ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Kowani serta merupakan bagian dari Muhammadiyah seperti layaknya Muslimat NU, masuk pada kategori organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah.

Bagi organisasi-organisasi perempuan Islam, dibentuk *Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI)*, yang berasaskan Islam dan Pancasila serta UUD 1945. Tugas yang paling

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

menonjol adalah penyelenggaraan kursus-kursus orientasi KB dalam perspektif Islam.<sup>9</sup>

Selain organisasi-organisasi yang masuk pada kategori di atas, muncul pula LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) gerakan perempuan independen baik yang berorientasi feminisme maupun bukan dan tidak berafiliasi dengan pemerintah, tetapi tetap berada dalam pengawasan pemerintah Orde Baru. Bahkan pemerintah cenderung mencurigai organisasi perempuan yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan, dengan dilabeli negatif dan dianggap antipemerintah atau perempuan komunis (yang pada saat itu komunis dicitrakan buruk oleh penguasa).

Pada tahun 1982 berdiri *Yayasan Annisa Swasti* (YASANTI) di Yogyakarta. Fokus gerakannya adalah membina buruh dan petani perempuan serta remaja putri yang putus sekolah. Tahun 1985 berdiri *Kalyanamitra* yang mengangkat isu-isu pekerja rumah tangga dan melakukan sejumlah penelitian tentang pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, dan perempuan pekerja.<sup>10</sup>

LSM lainnya berturut-turut muncul *Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita* (PPSW, 1986) yang memfokuskan gerakannya dalam sektor ekonomi. *Solidaritas Perempuan* (1990) fokus pada penanganan masalah pekerja perempuan yang pergi ke luar negeri. *Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan* (LBH APIK,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>10</sup> *Ibid.*

1995) dan *Mitra Perempuan* (1995) bertugas melakukan pelayanan, pendampingan, dan pembelaan bagi perempuan korban kekerasan.<sup>11</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 hasil dari ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mengakui hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia serta menjamin hak pendidikan dan partisipasi setara dengan laki-laki. Persoalan tentang pendidikan, kemiskinan, kesehatan, kekerasan, ekonomi, lingkungan hidup, dan media, menjadi landasan aksi dari Konferensi Perempuan sedunia ke-IV di Beijing pada tahun 1995. Hasil dari konvensi ini mendorong kondusifnya gerakan perempuan Indonesia karena ia memiliki landasan kebijakan yang jelas.<sup>12</sup>

Kebijakan pemerintah Orde Baru terkait bidang pendidikan adalah program pemberantasan buta huruf dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1975 tentang program bantuan pembangunan gedung Sekolah Inpres.<sup>13</sup> Perubahan yang signifikan terjadi antara tahun 1970- 1980. Pada masa itu, jumlah sekolah dasar meningkat dua kali lipat.<sup>14</sup> Kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan formal pun terbuka dan menjadi salah satu bagian dari perjuangan perempuan dalam menuntut haknya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Gunawan, 1986, dalam Putra dan Fatimah. "Nasib Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung pada Masa Transisi Orde Baru", *Kronologi*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 80.

<sup>14</sup> Fauzia, dkk. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm: 81.

Jumlah penduduk usia dewasa yang buta huruf mengalami penurunan angka mulai dari tahun 1961 sampai dengan 1990 menurun dari 69% menjadi 17% pada perempuan dan dari 44% menjadi 11% pada laki-laki. Pada tahun 1996, jumlah siswa perempuan yang melanjutkan sekolah menengah dan perguruan tinggi meningkat masing-masing dari 23% dan 35% menjadi 41% dan 50%. Selain itu, jumlah siswa perempuan dari total siswa di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi masing-masing sebanyak 48%, 45%, dan 35%.<sup>15</sup>

Seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang diperoleh, kaum perempuan semakin menyadari kondisi subordinasi dan marginal yang telah dialami kaumnya. Pada masa ini, kesadaran pendidikan dan aktualisasi diri perempuan yang tidak hanya sebatas ruang domestik, menjadikan angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat antara tahun 1990 dan tahun 1999, dari 25% menjadi lebih dari 37%.<sup>16</sup>

Ketimpangan gender di semua tingkat pendidikan mengalami penurunan. Presentase jumlah siswa perempuan per 100 siswa laki-laki meningkat menjadi 92,8 pada tahun 1996 dari 85,9 pada tahun 1976 di sekolah dasar. Di sekolah menengah dari 65,1 menjadi 95,0, dan di perguruan tinggi dari 56,7 menjadi 88,2. Begitu juga dengan proporsi guru perempuan, pada tahun 1996 mengalami peningkatan, di sekolah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

dasar dari 33% pada tahun 1980 menjadi 52%, di sekolah menengah 40%, dan perguruan tinggi adalah 30%.<sup>17</sup>

Berdasarkan data dari Departemen Agama tahun 1988-1989, di setiap provinsi di Indonesia, kecuali Timor Timur, telah ada lembaga pesantren. Jumlahnya sebanyak 6.631 buah dengan 958.670 orang santri dan 33.993 orang kiai. Jumlah pesantren pada tiap provinsi juga bervariasi antara 3-2479 buah.<sup>18</sup> Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian kepada lembaga pesantren, berupa diberikannya subsidi dan pembinaan, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas, dan masih banyak keberhasilan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam merangkul umat Islam. Pemerintah juga memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.<sup>19</sup>

Jaringan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) merupakan lembaga pendidikan tersier yang berada di bawah Departemen Agama dan berkembang pesat pada masa Orde Baru. Terdapat beberapa IAIN di Jakarta dan Yogyakarta yang menghasilkan arus intelektual muslim yang terdidik dan berkomitmen.<sup>20</sup> Misalnya muncul juga LSM berbasis

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>18</sup> Nizar. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 98.

<sup>19</sup> Yuningsih. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru", *Tarbiya*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 188.

<sup>20</sup> Ricklefs, *Op.Cit.*, hlm. 613-614.



komunitas Islam seperti *Lembaga Studi Agama dan Filsafat* (LSAF) dan *Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat* (P3M) pada tahun 1994. P3M mengembangkan program *fiqh-an-Nisa* dengan melakukan pelatihan terhadap juru dakwah perempuan (*mubaligoh*), guru agama (*ustadzah*), ibu nyai pengasuh pondok pesantren dan organisasi perempuan Islam di Jawa dan Kalimantan Selatan.<sup>21</sup>

Fakta di atas merupakan bukti usaha untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam proses pembangunan yang telah jelas tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988. Meskipun pada kenyataannya kebebasan dan keadilan hak tersebut tidak dirasakan semua perempuan secara merata karena dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti keluarga dan lingkungan yang berbudaya patriarki, sehingga kesempatan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan para perempuan.

“Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan.”<sup>22</sup>

Bidang kesehatan menunjukkan ada peningkatan pada masa pertengahan Orde Baru dibanding dekade sebelumnya, tercatat pada sensus 1990 terdapat 179,2 juta penduduk dan dilaporkan ada 25.125 dokter umum, spesialis, dan dokter gigi, sehingga rasionya menjadi satu dokter bagi 7,1 ribu penduduk. Jelas lebih ada peningkatan daripada pada tahun 1980 ketika satu dokter per 11,4 ribu penduduk. Meskipun begitu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Luthfiyah. “Feminisme Islam di Indonesia”, *Esensia*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 83.

tingkat ketersediaan fasilitas medis ini masih belum mampu mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand.<sup>23</sup>

‘Aisyiyah sebagai pelopor pendidikan anak usia dini pertama di Indonesia, sejak tahun 1963 telah membuka pendidikan bernama Sekolah Bidan ‘Aisyiyah, berdasarkan hasil musyawarah PP ‘Aisyiyah. Sekolah bidan ini diharapkan dapat membantu pelayanan kesehatan perempuan hamil khususnya di pedesaan.

“Sudah sewajarnya bahwa tiap2 sekolah bidan & sekolah djuru rawat itu mempunyai tujuan jang sama jaitu mendidik dan menghasilkan tenaga bidan & djuru rawat jang mempunyai kwalitet baik, memenuhi sjarat2 jang dituntut oleh ilmu kebidanan/kesehatan pada umumnja ... **jang tidak membedakan bulu dan tidak mengenal klas dalam menolong, semua golongan masjarakat dipandangnja sama dan diperlakukan sama pula.**”<sup>24</sup>

‘Aisyiyah selalu menghubungkan segala kegiatan dengan nilai-nilai ajaran Islam bahwa dalam membantu sesama harus disertai dengan rasa ikhlas untuk menolong tanpa membeda-bedakan kelas atau golongan. ‘Aisyiyah melalui SA mengumumkan informasi tentang Sekolah Bidan ‘Aisyiyah ini, seperti lokasi sekolah, persyaratan penerimaan siswa, serta informasi penting lainnya.

Kesuksesan terbesar Orde Baru salah satunya program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya mengatasi tingginya krisis pertumbuhan penduduk. Secara religius dan kultural, program KB yang menggunakan

---

<sup>23</sup> Ricklefs, *Op.Cit.*, hlm. 600-601.

<sup>24</sup> Suara ‘Aisyiyah, Thn. 1963, No. 6, hlm. 7-8.

pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi ini tidak mendapat pertentangan, dibandingkan proses sterilisasi dan aborsi. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan menurun pada tahun 1980-an menjadi 1,97% dari 2,10% pada 1970-an.<sup>25</sup> Namun, tidak sedikit orang mengkritik program KB, mengingat pemerintah cenderung memedulikan secara kuantitas artinya mencapai sebanyak mungkin akseptor KB, tanpa memikirkan kualitas dari layanan KB tersebut khususnya terhadap kesehatan reproduksi para akseptor yang mayoritas adalah perempuan.<sup>26</sup>

Orde Baru menggambarkan citra perempuan yang baik adalah seorang ibu yang senantiasa mengurus semua urusan domestik. Perempuan harus patuh dan taat terhadap politik negara.<sup>27</sup> Program KB harus dilaksanakan sebagai bentuk keikutsertaan perempuan dalam pembangunan negara. Perempuan yang berani tampil untuk mengkritik pemerintah akan “dibungkam” dan menerima stigma negatif.

Penundukan perempuan ini dijadikan sebagai salah satu strategi dalam melanggengkan kekuasaan penguasa dan berdampak pada rentannya posisi perempuan terhadap perilaku kekerasan. Orde Baru memberikan daftar panjang ketidakadilan yang dialami perempuan serta pelanggaran HAM terhadap sebagian besar warga negaranya, di samping pembangunan ekonominya yang berjaya, meskipun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru berakhir dengan berbagai konflik sosial-politik,

---

<sup>25</sup> Ricklefs, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> Sihite, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>27</sup> Mariana, *Op.Cit.*, hlm. 20.

kemerosotan ekonomi, dan rakyat yang sudah tidak tahan dalam keadaan negara yang otoritarianisme dan sarat akan KKN-nya (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

‘Aisyiyah menjadi salah satu organisasi perempuan Islam yang ikut memperjuangkan keadilan bagi perempuan melalui beragam programnya yang dipublikasikan melalui majalah SA. Meskipun pergerakannya terkesan konservatif dan tidak radikal, tetapi ‘Aisyiyah mampu bertahan dalam keadaan perpolitikan Orde Baru yang kurang ramah pada perempuan. ‘Aisyiyah juga tidak luput dari anggapan sebagai pendukung pemerintah karena sifat gerakannya yang lebih halus, padahal dalam majalahnya, SA seringkali menulis artikel berisi kritik terhadap pemerintah khususnya berkaitan ketidakadilan pada perempuan dan praktik KKN yang sudah melekat dalam pemerintahan Orde Baru. ‘Aisyiyah bersama organisasi perempuan lainnya serta perempuan pada umumnya memperjuangkan kebebasan yang adil bagi perempuan melalui pergerakan menuju masa reformasi.

## **B. Pergerakan Perempuan Menuju Reformasi Tahun 1998**

Era reformasi merupakan usaha dan langkah-langkah pembaharuan dan perbaikan secara menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, termasuk

memperjuangkan keadilan perempuan dan manusia seluruhnya.<sup>28</sup> Kesadaran yang timbul akibat dari banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan sejak tragedi '65, para perempuan, akademisi, aktivis mulai berani untuk tampil ke muka umum disertai dengan kampanye-kampanye anti kekerasan.

Media cetak merupakan salah satu cara pergerakan perempuan dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam berbagai bidang. Menjelang sidang umum pascapemilu, SA memuat artikel *Harapan Muhammadiyah pada Pemerintah dan Rakyat Indonesia*<sup>29</sup> yang berisi 10 seruan dan harapan menuju perbaikan bangsa.

*Pertama*, ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban. *Kedua*, kepada anggota MPR agar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. *Ketiga*, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) secara bertahap, konkret, dan sungguh-sungguh. *Keempat*, para pejabat hendaknya mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran dan keadilan. *Kelima*, pemerintah harus mampu menjaga dan mengamankan sumber daya alam Indonesia yang kaya ini.

*Keenam*, perbaikan dalam pengelolaan dan sistem ekonomi yang semakin menimbulkan kesenjangan sosial akibat monopoli kapitalisme dan keluargaisme. *Ketujuh*, kedaulatan ekonomi yang sebelumnya

---

<sup>28</sup> Pratama dan Zulhijra. "Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia", *PAI Raden Fatah*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 120.

<sup>29</sup> Suara 'Aisyiyah, No. 3, 1998, hlm. 22-23.

digadaikan pada IMF (*International Monetary Fund*) harus dipulihkan agar tegak kembali kehidupan ekonomi nasional yang mandiri. *Kedelapan*, aturan dan hukum HAM harus ditegakkan tanpa pandang bulu. *Kesembilan*, pemerintah harus berusaha membangun sumber daya manusia yang tangguh dan kompeten.

*Kesepuluh*, dalam mencapai harapan perbaikan-perbaikan tersebut harus ada kerjasama yang besar dan bersih antara cendekiawan, teknokrat, teknolog, pengusaha, ABRI, ulama/ rohaniwan, politisi, birokrat, dan para aktivis masyarakat/ LSM untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Harapan-harapan yang dimuat di atas merupakan bukti bahwa media sangat berpengaruh melakukan proses penyadaran, edukasi, dan ajakan yang berkaitan dengan pergerakan perempuan dan massa secara umum. Sejatinya, pergerakan tidak hanya sebatas aksi turun ke jalan saja.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik mulai menonjol setelah beberapa anggota Muslimat NU dan Fatayat ikut serta dalam perpolitikan Indonesia. Keikutsertaan perempuan dalam bidang politik untuk merombak perspektif politik yang *male design* dan *male perspective* menuju politik yang adil gender, yaitu adil secara proporsional antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus politik yang ramah, empati, dan afirmatif terhadap kaum marginal

khususnya perempuan yang selama masa Orde Baru menjadi korban politik laki-laki.<sup>30</sup>

Gerakan perempuan yang berkecimpung dalam bidang politik dicontohkan oleh anggota Muslimat NU yaitu Khofifah Indar Parawansa yang jejak perpolitikannya bisa dilihat sejak tahun 1989, bahkan ia pernah menjadi Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Abdurrahman Wahid (29 Oktober 1999-26 Agustus 2000) dan menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU (2000-2005).<sup>31</sup>

Terdapat juga Ermalena yang pernah menjadi Ketua Umum Fatayat NU yang merupakan kader perempuan NU dalam dunia politik. Ada pula Musdah Mulia yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan wacana politik dan keislaman di Indonesia. Ia aktif dalam lembaga Forum Kajian Gender Departemen Agama bersama Nasaruddin Umar, yang kemudian memengaruhi pemikiran wacana Islam dan keadilan gender dalam NU.<sup>32</sup>

Nama tokoh Masruchah dan Nursyahbani Katjasungkana yang sama-sama aktif dalam KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang didirikan pada tahun 1998. Nursyahbani juga terlibat aktif dalam aktivitas politik partai dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta serta aktivitasnya selalu identik dengan perempuan politik dari NU.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Roviana. "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik", *Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 419-420.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 406.

Tokoh-tokoh di atas dapat menambah daftar panjang gerakan perempuan NU yang berperan aktif dalam dunia politik, tetapi harus ditunjang dengan riwayat pendidikan yang memadai, sehingga dapat diambil kesimpulan memang peran pendidikan begitu berpengaruh dalam mendorong perempuan menunjukkan potensinya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setelah mendapatkan pendidikan dan pemahaman bahwa posisi kaum perempuan dalam kondisi yang memprihatinkan maka beragam organisasi/ komunitas maupun perseorangan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang berbeda, dari yang paling halus hingga yang paling masif dan ekstrimis.

Gerakan perempuan dimulai dari aksi konsolidasi aktivis LSM, akademisi, dan ibu rumah tangga mendirikan Suara Ibu Peduli (SIP) sebagai aksi sosial menghadapi krisis moneter<sup>34</sup> yang berdampak pada segala sektor kehidupan, misalnya harga bahan pokok yang melonjak naik akibat merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS. SIP bersama-sama membantu dan menyebarkan informasi berkaitan dengan krisis ekonomi, isu-isu sosial perempuan akar rumput, makna politik feminisme, yang terhimpun dalam *Jurnal Perempuan*.<sup>35</sup>

Peristiwa penting yang dilakukan SIP adalah pada Februari 1998 ketika aktivis perempuan bersatu melakukan demonstrasi di Bundaran

---

<sup>34</sup> Krisis moneter adalah melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS, kemudian berdampak menjadi krisis ekonomi yaitu lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan banyaknya pengangguran, sedangkan harga bahan dan barang pokok semakin naik. Lihat: Tarmidi. "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, No. 4, 1999, hlm. 1.

<sup>35</sup> Affiah, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 18.



Hotel Indonesia, Jakarta, untuk menuntut diturunkannya harga susu. Banyak media memberitakan peristiwa ini serta diliput oleh sejumlah pers asing, terutama ketika dua dari 15 perempuan yang berdemonstrasi ditangkap dan diadili.<sup>36</sup> Aksi yang dilakukan SIP ini mempunyai pengaruh besar menjelang jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru.

Tanggal 18 Mei 1998 berdiri Koalisi Perempuan Indonesia, dideklarasikan oleh 22 perempuan dan berkembang didukung oleh kurang lebih 75 aktivis dari berbagai penjuru tanah air. Koalisi ini lahir didasarkan pada pandangan bahwa politik adalah arena strategis untuk memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, strategi utama KPI adalah meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan pada semua tingkatan masyarakat.<sup>37</sup>

KPI menjadi organisasi perempuan berbasis massa pertama yang mengedepankan pemberdayaan politik perempuan ketika saat itu pemerintah melarangnya. Setelah memasuki era reformasi KPI berjuang gigih untuk memasukkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan badan-badan negara lainnya.<sup>38</sup>

Gerakan perempuan masa transisi dari Orde Baru menuju reformasi merupakan rangkaian panjang perjuangan gerakan perempuan, gerakan demokratisasi, gerakan akar rumput, dan gerakan HAM untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

meruntuhkan rezim Orde Baru yang paternalistik dan penuh dengan penindasan. Pengabaian hak buruh, kelompok marjinal, tekanan politik berupa pemberangusan kebebasan berbicara, berekspresi, dan berorganisasi, pembredelan media serta penghilangan paksa sejumlah aktivis menjadi alasan kekecewaan rakyat pada pemerintah atas deretan kesewenang-wenangan pemerintah. Puncak perlawanan terjadi pada 12 Mei 1998 ketika mahasiswa turun ke jalan-jalan berdemonstrasi dan berakhir dengan tertembak mati empat mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat militer.<sup>39</sup>

Akibat peristiwa berdarah itu setidaknya 1000 orang meninggal karena kerusuhan pembakaran rumah dan pusat pertokoan, serta 85 perempuan etnis Tionghoa menjadi korban pemerkosaan.<sup>40</sup> Ketika BJ Habibie menggantikan posisi Soeharto menjadi presiden Indonesia dan dimulainya era reformasi, saat itu pula Komnas Perempuan lahir sebagai respon terhadap peristiwa kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa serta atas desakan dari masyarakat yang terhimpun dalam Masyarakat Anti Kekerasan.<sup>41</sup>

Tanggal 15 Juli 1998, 22 perempuan dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan profesi yang mewakili Masyarakat Anti Kekerasan dengan membawa 4000 tanda tangan kepada Presiden Habibie untuk menyampaikan keprihatinan dan meminta tanggung jawab dari

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

pemerintah atas tragedi Mei 1998, menuntut agar diusut tuntas pelaku dan perencananya, serta memastikan peristiwa semacam itu tidak terjadi kembali. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1998 didirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan keputusan Presiden No. 181/1998. Komisi ini bersifat independen dan mempunyai mekanisme secara nasional, mencakup elemen-elemen masyarakat.<sup>42</sup>

Setelah berdirinya Komnas Perempuan, para korban kekerasan dari wilayah DOM Aceh mulai berani melapor berbagai kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka meminta bantuan hukum dan pemulihan psikologis dari negara serta diharapkan akan membuat perempuan korban kekerasan lainnya berani mengungkapkan jika dijamin perlindungannya. Dampak positifnya keberanian ini mendorong dicabutnya status DOM di Aceh pada bulan Agustus 1998. Disusul pembentukan tim Pencari Fakta di beberapa kabupaten sebagai upaya mewujudkan penegakan HAM warga Aceh.<sup>43</sup>

Selama 15 tahun mengemban amanah di era reformasi, Komnas Perempuan telah mencatat berbagai kemajuan dan pencapaian berupa dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak asasi perempuan, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia; Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pembangunan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta undang-undang lainnya tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.<sup>44</sup>

Perkembangan Komnas Perempuan yaitu mampu mendirikan 253 unit lembaga baru dari Aceh hingga Papua yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak serta saksi dan korban. Meskipun dalam perjalanannya seringkali menghadapi hambatan karena keterbatasan dukungan pendanaan dari masyarakat sipil.<sup>45</sup>

Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2002 tercatat 5.163 kasus, tahun 2003 menjadi 7.787 kasus, dan terus bertambah setiap tahunnya, hingga pada tahun 2012 tercatat 216 ribu kasus. Kenaikan angka tersebut dilatarbelakangi oleh semakin tersebar informasi terkait peran Undang-Undang PKDRT. Kemudian kasus yang tercatat pun beragam yang melibatkan kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan, transportasi umum, sampai dengan lingkungan keagamaan.<sup>46</sup>

Gerakan perempuan pada masa transisi difokuskan pada pembentukan lembaga untuk upaya melindungi perempuan dan anak korban dari kekerasan baik di ruang privat maupun ruang publik. Era reformasi dijadikan kesempatan bagi gerakan perempuan dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

melakukan peninjauan ulang yang kritis terhadap praktik perkawinan poligami, perlindungan perempuan atas tubuh dan integritasnya, perubahan undang-undang perkawinan yang adil gender, hak-hak politik-sosial-ekonomi-budaya, terutama pembangunan sistem perlindungan pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Muncul pula tokoh-tokoh perempuan reformasi yang aktif mengabdikan diri untuk pergerakan perempuan di berbagai tingkatan.